

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan baik itu perusahaan jasa, industri maupun perusahaan dagang senantiasa berusaha mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh dan meningkatkan laba serta mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan yang menjual jasa dan berusaha mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah bank. Jasa yang diberikan oleh bank kepada masyarakat berupa jasa keuangan, sebagai bentuk partisipasi dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, khususnya pada bidang ekonomi, pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha yang dilaksanakan melalui langkah-langkah dan kebijaksanaan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan yang diharapkan.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang positif telah membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis perbankan nasional. Dalam upaya memperkuat market positioning, khususnya sektor perbankan merupakan rangkaian transformasi bisnis yang fokus pada bisnis berbasis nasabah. Bank hadir untuk memberikan layanan dalam memprioritaskan penanganan penyaluran pinjaman (kredit) kepada nasabah salah satunya adalah Perkreditan Perbankan Kecil dan Menengah. Diantaranya berbagai kebijakan ekonomi yang dilaksanakan, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian pemerintah karena bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga bank dituntut peransertanya untuk mensukseskan pembangunan melalui jasa kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Salah satu jenis kredit yang diberikan bank adalah kredit usaha kecil dan menengah atau yang lebih dikenal dengan istilah "KUR". Dalam hal ini kredit usaha rakyat merupakan bantuan dari pihak bank yang diberikan kepada nasabah yang ingin membuka usaha sebagai modal awal dalam membuka usahanya atau

untuk tambahan modal usaha produktif dalam bentuk kredit modal kerja, nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai kredit investasi. Pemberian kredit adalah salah satu andalan perbankan yang banyak menarik minat masyarakat. Kredit selain sebagai aktiva produktif terbesar suatu bank juga merupakan pembawa resiko tertinggi yang mampu mempengaruhi tingkat kesehatan bank (Firdaus dan Ariyanti, 2009). Salah satu resiko dari penyaluran kredit tersebut adalah munculnya kredit bermasalah atau yang sering disebut kredit macet atau bisa disebut juga sebagai non performing loans (NPL). Arti dari kredit macet ialah kredit yang disalurkan tidak dapat ditagih kembali sehingga mengancam likuiditas bank tersebut (Irwan:2010).

Pemberian kredit usaha rakyat mengandung resiko tertentu, sehingga pihak bank tidak begitu saja memberikannya. Seperti yang dikata oleh Kepala Bagian Kredit usaha kecil dan menengah beliau mengatakan:

“ kredit usaha rakyat akan diberikan apabila manajemen bank merasa yakin bahwa nasabahnya dapat mengembalikan kredit usaha tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati, baik pokok ataupun bunga pinjaman yang ditetapkan, sehingga bank dapat menghindari diri dari tidak tertagihnya kredit tersebut, yang nantinya akan menimbulkan masalah kredit macet.”(Manuskrip wawancara IK, 6 Juli 2019).

Pemberian kredit ini juga melalui banyak tahap yaitu untuk langkah awal nasabah melakukan pengisian aplikasi kemudian di proses oleh bagian administrasi setelah kelengkapan data sesuai pihak analis kredit yang melakukan BI checking dan memproses analis kredit nasabah setelah semua sesuai pihak bank melakukan proses akad kredit dengan nasabah dan terakhir pencairan kredit. Kredit macet yang terjadi terutama disebabkan oleh faktor manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, faktor penguasaan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari sumber daya manusia yang masih lemah. Sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus kredit macet yang disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka timbul permasalahan yang tidak diinginkan seperti kekurangan kemampuan masing masing bank menilai mutu kredit yang telah mereka berikan.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemberian kredit dari semestinya, bank harus menyusun kebijakan kredit yang komprehensif dan jelas dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu kebijakan tersebut. Salah satu cara yang dapat membantu perusahaan dalam

menilai efektifitas prosedur pemberian kredit adalah dengan adanya audit internal yang memadai. Tujuan dari perbankan itu sendiri adalah menekan nilai kredit bermasalah yang merupakan rasio dari kredit bermasalah, walaupun nilai kredit bermasalah bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal namun dengan adanya pengendalian internal yang memadai akan mampu memperkecil nilai kredit bermasalah tersebut.

Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan penyelewengan-penyelewengan yang akan terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengendalian internal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan internal atau audit internal. Audit internal adalah fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan oleh organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi secara obyektif aktivitas-aktivitas organisasi, yang hasil penelitiannya berupa saran, rekomendasi, analisis, dan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam mengusahakan agar perusahaan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan demikian diperlukan suatu penilaian yang independen dalam perusahaan yang bersangkutan untuk menilai dan mengevaluasi aktivitas pemberian kredit agar pengendalian internal tersebut dapat memadai. Fungsi yang melakukan pengendalian ini dilakukan oleh audit internal.

PT Bank Negara Indonesia Tbk menargetkan penyaluran kredit pada tahun 2018 ini dapat tumbuh antara 13-16 persen secara tahunan. Target tersebut sejalan dengan ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu bank berkode emiten BBNI tersebut pun menargetkan perolehan dana pihak ketiga atau DPK dapat tumbuh antara 13-15 persen. Perseroan pun mengejar penurunan rasio kredit bermasalah atau non performing loans ke kisaran 2,3 – 2,5 %. Fasilitas kredit BNI KUR diberikan hingga maksimal Rp 500 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga 3 tahun untuk kredit modal kerja 5 tahun untuk kredit investasi.

Pada tahun 2016 pinjaman segmen kecil di BNI mencapai sebesar Rp. 50,7 triliun atau tumbuh sebesar 20,5 % dari pencapaian tahun 2015 yang sebesar Rp. 42,1 triliun, pencapaian ini menyumbang sebesar 12,9 % dari total kredit BNI

(konsolidasi). Dari sisi kualitas kredit, NPL segmen kecil juga menunjukkan perbaikan ditandai dengan adanya penurunan rasio NPL dari 4,0% pada tahun 2015 menjadi 3,0 % di tahun 2016. Dan ditahun 2017 pencapaian kredit mencapai Rp. 44,1 triliun atau meningkat sebesar 12,2 %. Dari sisi kualitas kredit, NPL segmen keil juga menunjukkan perbaikan, ditandai dengan adanya penurunan rasio NPL dari 3,0% pada tahun 2016 menjadi 2,3% pada tahun 2017. Dan ditahun 2018 pencapaian kredit menjadi Rp 487,4 T atau sebesar 15,6 % dengan perolehan NPL sebesar 1,9 % menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,3 %. Penurunan pemberian kredit disebabkan penyaluran kredit yang dibatasi setiap tahunnya.

Berikut laporan data pertumbuhan kredit dari tahun 2016 hingga 2018 beserta laporan data NPL per tahunnya di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. (sumber [www.kompas.com](http://www.kompas.com) ).

Tabel 1. Laporan Data Kredit Berdasarkan Tahun

Keterangan	2016	2017	2018
Kredit	50,7 T	44,1 T	48,7 T
NPL	3,0 %	2,3 %	1,9 %
NIM	6,2 %	5,5 %	5,3 %

Sumber:Laporan Keuangan PT Bank Negara Indonesia

Kredit macet dalam jumlah yang sangat besar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bank tersebut, baik dilihat dari sudut operasional bank dan dampak psikologi yang terjadi. Dan menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor 15/15/PBI/2013 tentang giro wajib minimum bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional pasal 11 no 2b bahwa rasio NPL total kredit secara bruto kurang dari 5%. Bank Negara Indonesia memakai peraturan Permenko nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan KUR Surat BSL No BSL/1/1111 Tanggal 22 Desember 2017.

Dengan adanya kredit macet, kegiatan bank terhambat sebab keuntungan utama bank diperoleh dari selisih bunga simpanan bank kepada nasabah dengan bunga pinjaman kredit atau kredit yang disalurkan. Selain itu dampak psikologi yang akan terjadi adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Masalah tingginya jumlah kredit macet sangat meresahkan masyarakat

terutama masyarakat perbankan, karena hal tersebut berkaitan dengan kredibilitas bank. Sebagian dari kredit macet yang diserahkan bank-bank terutama milik pemerintah kepada Badan Penyehatan Bank Nasional (BPPN) tidak jelas statusnya. Disamping itu tidak didukung dokumen-dokumen legal yang kuat dan lengkap, serta jaminan assetnya juga tidak cukup dan nilainya pun tidak cocok. Tingkat persaingan antar bank dan resiko perkreditan yang tinggi menyebabkan pihak manajemen bank perlu menerapkan suatu pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik perusahaan dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kemacetan kredit, serta meningkatkan efektifitas kerja.

Munawaroh (2011), Dalam penelitiannya mengenai Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektifitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah pada Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri, Dalam penelitiannya yang diangkat yaitu apakah pengendalian internal yang diterapkan koperasi sudah efektif dan apakah sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah koperasi sudah efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada koperasi pegawai Bank Rakyat Indonesia Kediri dan sistem pengendalian internal tersebut telah efektif.

Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan efektifitas pengendalian internal sebesar 93,75%. Sistem pemberian kredit yang diterapkan koperasi pegawai Bank Rakyat Indonesia Kediri telah efektif. Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan efektifitas pemberian kredit sebesar 92,72%. Dan peranan pengendalian internal dalam menunjang efektifitas pemberian kredit tidak dapat diabaikan. Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan peranan pengendalian internal dalam menunjang efektifitas pemberian kredit sebesar 93.65%.

Handayani (2012) Dalam penelitiannya mengenai Sistem Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektifitas Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk Kanwil Surabaya. Dalam

peneitiannya yang diangkat yaitu Bagaimana sistem pengendalian internal pada BNI dalam menunjang efektifitas pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian internal. BNI memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. BNI juga menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha rakyat tersebut. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pada PT Bank Negara Indonesia Tbk Kanwil Surabaya telah sesuai dengan teori-teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif.

## 1.2 Fokus Penelitian

Guna mempertajam penelitian, peneliti telah menetapkan fokus penelitian. Aspek penting lain dalam pertanyaan penelitian kualitatif adalah latar batasan-batasan (*setting of boundaries*) pada apa yang akan diteliti. Karena tidak mungkin bagi peneliti mana pun untuk mencakup seluruh aspek dalam suatu masalah. Selain itu Moleong (2010 hlm 94) mengatakan penetapan fokus penelitian pada akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti melakukan penelitian, karena bisa terjadi situasi di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian awal. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh dari pengamatan langsung yang dilakukan peneliti sehingga memperoleh gambaran umum yang merupakan tahap permukaan tentang situasi perusahaan.

Fokus dalam penelitian ini adalah Peranan pengendalian internal, tujuan pengendalian internal dan sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah dengan indikator pelaksanaan sistem pemberian kredit yang efektif.

### 1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah telah peneliti sampaikan yang di atas, peneliti dapat membangun rumusan masalah yang ada.

- a. Apakah pengendalian internal yang diterapkan PT Bank Negara Indonesia sudah efektif ?
- b. Apakah sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada PT Bank Negara Indonesia sudah efektif ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan diatas, peneliti dapat memberikan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan efektifitas pengendalian internal yang diterapkan PT Bank Negara Indonesia.
- b. Menjelaskan efektifitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada PT Bank Negara Indonesia.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai audit internal dan pengendalian internal kredit kecil dan menengah.

- b. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan khususnya audit internal dan pengendalian internal kredit kecil dan menengah perusahaan tersebut.